

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Sebagai pemegang Presidensi tahun 2022, Indonesia memiliki peran menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Untuk itu, perhelatan ini dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai wadah serta ajang menunjukkan posisi negara kita dalam memimpin forum global yang bertujuan mengatasi berbagai tantangan serta isu di tingkat dunia. Salah satunya adalah merencanakan strategi kerjasama ekonomi untuk meningkatkan perekonomian. Selain itu kebijakan yang dilakukan Indonesia terhadap ekonomi digital juga perlu untuk dibahas dimana dalam kebijakan yang dilakukan Indonesia terdapat upaya-upaya untuk memenuhi target yang telah ditentukan sebagai cara untuk mencapai kepentingan nasional. Globalisasi yang mempengaruhi peran juga kebijakan Indonesia dalam ekonomi digital mampu memudahkan dalam mencapai pasar internasional yang mana hal ini dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi pulih kembali.

Indonesia yang memiliki langkah strategi guna memenuhi kepentingan nasionalnya yaitu untuk memulihkan perekonomian negara mengambil langkah untuk memaksimalkan dan meningkatkan ekonomi berbasis digital. Dalam forum G20 Indonesia memiliki peran aktif dalam kontribusinya terhadap perekonomian global. Di dalam era globalisasi interdependensi antarnegara akan semakin tinggi, sehingga transformasi ekonomi kearah ekonomi digital memang sangat diperlukan agar Indonesia dapat menghadapi hantaman globalisasi dan dapat

mempertahankan pencapaian kepentingan nasionalnya. Dengan kontribusi Indonesia di forum G20, diharapkan Indonesia dapat berkontribusi lebih dan mampu memulihkan ekonomi nasional maupun global dengan cara peningkatan terhadap ekonomi digital.

Salah satu literatur yang penulis review adalah kajian yang ditulis oleh **Harra Fisabilillah dengan tulisannya yang berjudul Motif Indonesia Membahas *Inclusive Digital Economy Accelerator HUB (IDEA HUB)* Dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Osaka 2019**. Dalam jurnal tersebut penulis membahas mengenai analisisnya terhadap motif Indonesia yang mengusulkan konsep IDEA HUB pada pertemuan KTT G20 di Osaka. Pada penelitian tersebut memberikan hasil bahwa Indonesia menunjukkan respon yang positif dalam perkembangan ekonomi digital. Melalui IDEA HUB, Indonesia telah sepenuhnya memenuhi komitmennya untuk meningkatkan interoperabilitas berbagai nasional dan internasional kerangka kerja.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Harra Fisabilillah dengan penelitian ini adalah latar belakang waktu yang diambil. Dalam penulisan ini, penulis tidak hanya membahas kebijakan Indonesia pada forum G20 2019 saja akan tetapi penulis juga membahas mengenai kebijakan Indonesia pada forum G20 2022. Selain itu teori yang diambil oleh penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Harra Fisabilillah.

Selain perbedaan yang ada, persamaan yang dari penelitian ini adalah karena penulis juga akan membahas kebijakan Indonesia pada forum G20 pada tahun 2019 di Osaka dengan mengusung tema IDEA Hub.

Selanjutnya kajian yang ditulis oleh **Wiwiek Rukmi Dwi Astuti (2020)** dalam penelitiannya yang berjudul **“Diplomasi Ekonomi Indonesia di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo”**.

Di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis selalu mengambil posisi strategis untuk mewujudkan kepentingan ekonominya. Ekonomi menjadi domain penting dalam orientasi politik luar negeri Indonesia, sehingga ekonomi adalah upaya Indonesia terlibat dalam menstabilkan ekonomi nasional, regional dan internasional. Pola pemikiran ini sebagai bentuk rasionalitas negara modern yang mengkalkulasi setiap kontribusi melalui aksi. Perubahan ekonomi politik global tentu saja menuntut peran aktif dan adaptif dalam menjalin hubungan ekonomi dalam kerja sama internasional. Diplomasi ekonomi menjadi salah satu instrumen penting bagi Indonesia dalam mewujudkan kemakmuran Indonesia, sehingga kemampuan dalam berdiplomasi ekonomi merupakan hal yang krusial.

Menurut Astuti, hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan Indonesia di G20 sebagai upaya berkontribusi dalam ekonomi global. Orientasi ekonomi yang tinggi membuat diplomasi ekonomi adalah pilihan rasional bagi Indonesia untuk menjaga kepentingannya di luar negeri. Diplomasi ekonomi Indonesia digunakan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional dan internasional baik bidang perdagangan, investasi dan finansial. Dengan kolaborasi tiga bidang tersebut diharapkan bisa menjadi indikator menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan global serta sebagai upaya mencari mitra dan menjaga mitra Indonesia di luar negeri.

Dengan demikian, upaya tersebut sebagai bentuk implementasi politik luar negeri Indonesia pada bidang ekonomi. ⁸

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Wiwiek Rukmi Dwi Astuti dengan penelitian ini terletak pada focus penelitian. Dalam penelitian terdahulu, lebih fokus kepada orientasi politik luar negeri Indonesia (Diplomasi Ekonomi) dalam menstabilkan perekonomian Indonesia sebagai keterlibatan Indonesia dalam forum G20, sedangkan penelitian yang sekarang lebih berfokus kepada Peran Indonesia dalam pengembangan dan peningkatan Ekonomi dalam berbasis digital.

Selain dari perbedaan yang ada, persamaan dari penelitian ini adalah sama - Sama membahas peran Indonesia dalam kerjasama di forum G20 dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif.

Selanjutnya penelitian, **Cindy Larasati dan Ester Desy Natasya (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan”**.

Menurut Cindy dan Ester, dalam forum G-20 negara Indonesia berperan aktif serta ikut berkontribusi sebagai anggota tunggal yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, di dalam forum ini Indonesia banyak menghadapi tantangan seperti bagaimana Indonesia harus dapat menjaga kestabilan negara khususnya dalam kebijakan ekonomi. Selain itu, Indonesia harus jeli dalam melihat dan belajar

⁸ Astuti, W. R. D dan Fathun, L. M. *Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo*, (Intermestic: Journal of International Studies 5 (1): 47-88, 2020), diakses dari doi:10.24198/intermestic.v5n1.4

bagaimana kerja sama yang dijalin dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara maju, dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak saling merugikan. Selain itu, Indonesia harus mampu mempersiapkan diri dan mampu bersaing dalam dunia perekonomian agar tidak tertinggal dengan negara anggota lainnya dan sebagai satu-satunya negara yang mewakili ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar. Indonesia tak hanya harus membawa kepentingan domestik dalam negeri, namun juga membawa kepentingan ASEAN ke dalam forum ini.⁹

Dari penelitian tersebut perbedaan yang penelitian dibahas oleh Cindy Larasati dengan penelitian penulis yaitu mengenai pemanfaatan forum G20 sebagai Peluang Indonesia untuk meningkatkan pengaruh Indonesia dalam kancah Internasional, selain itu penelitian ini juga pemanfaatan investasi infrastruktur untuk mengatasi hambatan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian berfokus kepada target yang diterapkan Indonesia dalam Forum G20 dalam kebijakan ekonomi digital yang berdampak bagi perekonomian digital serta pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid – 19. Sedangkan persamaannya terletak pada, pengelolaan transformasi digital sebagai peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan dan mempermudah pendapatan.

Keuntungan nasional merupakan sesuatu yang dapat menguntungkan bagi suatu bangsa, dalam hal ini perekonomian bisa menjadi salah satunya. Untuk dapat mencapai kepentingan nasional, konsep ekonomi liberal dapat menjadi langkah awal bagi sebuah negara untuk bisa berkontribusi dalam pasar internasional. Salah

⁹ Larasati, C. dan Natasya, E. D. *Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan*, (Jurnal Hubungan Internasional 2: 147-159, 2017)

satu cara agar dapat memasuki pasar internasional maka konsep ekonomi digital yang dapat membuat seluruh lapisan masyarakat dari berbagai negara berkontribusi dalam pasar hanya dengan alat digital akan dirasa tepat dalam pemenuhan kepentingan nasional. Karena dalam ekonomi digital didasarkan pada konsep penggunaan internet, kecerdasan buatan, dan teknologi komputer yang secara umum membawa transaksi ekonomi lebih cepat, lebih ekonomis, dan lebih efektif. Transaksi ekonomi digital mendorong perubahan pola pikir individu dan organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan transaksi yang lebih efisien.

2.2 Review Teori

2.2.1 Ekonomi Digital

Ekonomi digital juga menganut sistem ekonomi liberal yang mana ekonomi liberal merupakan sebuah konsep dari pasar bebas, dimana setiap individu dapat langsung berkontribusi dalam peningkatan ekonomi negara dengan menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif dari para pelaku usaha. Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh don Tapscott ditulis dalam bukunya *The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. Dalam bukunya Tapscott menyatakan bahwa ekonomi digital juga disebut ekonomi baru, hal ini dicirikan dengan adanya penggunaan informasi digital secara eksklusif, tetapi ekonomi digital tidak hanya merujuk pada pasar tik saja (Budiarta dkk, 2020).

Ekonomi digital dapat di artikan sebagai perilaku manusia tentang cara memilih untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan hanya menggunakan jari jemari atau ekonomi digital bisa juga diartikan sebagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi dan distribusi dengan

menggunakan jari jemari. Pengertian ekonomi digital diatas berarti bahwa manusia tidak perlu lagi ke pasar untuk mendapatkan barang dan jasa, tetapi cukup dengan smartphonenya maka barang sudah bisa sampai dirumah untuk memenuhi keinginannya (Permana dan Puspitaningsih, 2019).

Dalam Pudhail dan Baihaqi (2020) bahwa ekosistem Ekonomi Digital pertama dipopulerkan lewat buku *A Digital Business Ecosystem or Innovation* (Nachira, 2007). Pada dasarnya ekosistem adalah *Lingkungan atau habitat "sesuatu" dimana dia hidup dan bergantung*. Industri internet terdiri dari 4 lapis industri vertikal, dan 19 segmen industri secara horisontal pada masing-masing lapis. Kategori lapis vertikal bermakna bahwa jika lapis bawahnya hilang, lapis diatasnya otomatis tidak akan berfungsi, hingga dikenali sebagai ekosistem. *E-Commerce (electronic commerce)*, merujuk kepada penggunaan internet berikut ekosistemnya untuk dapat menjalankan bisnis perdagangan barang dan jasa, mulai dari pemesanan (opsional), manjajakan sampai transaksi barang atau jasa, alat pembayaran, bahkan sampai pengiriman dan pelayanan purna-jual, (Plunkett dkk, 2015). *E-Commerce* dan *e-business*, tidaklah relevan dibedakan, bedanya *e-business* memiliki volume sumber daya yang besar, dengan modul fungsional yang lengkap, mulai dari B2B, B2B2C, B2C, C2B, C2C, B2G, G2B, serta M2M dan P2P sebagai layanan gateway payment (Arthur D. Little, 2016).

Konsep ekonomi digital dipilih karena konsep ini memiliki hubungan kedua konsep yang lain. Konsep ekonomi digital jika dikaitkan dengan kepentingan nasional maka dapat dijadikan sebagai cara dalam pemenuhan kepentingan nasional sebuah negara. Jika dikaitkan dengan ekonomi liberal, maka ekonomi digital

sebagai alat untuk dapat membawa individu untuk mencapai pasar bebas dan berkontribusi dalam pasar global.

2.2.2 Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008). Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam membuat atau merumuskan kebijakan luar negerinya. Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau, antara lain : Pertama, perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas teritorialnya, Kedua, perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya, Ketiga, perlindungan terhadap budayanya, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya.

Kepentingan nasional suatu negara ialah hasil yang dibuat oleh para pembuat kebijakan sehingga kepentingan nasional suatu negara dapat berbeda atau bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi bangsa (Yani, dkk. 2017). Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum

negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.

Kepentingan nasional (national interest) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (prosperity), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara (Rudy, 2002 : 116). Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan.

Hubungan kepentingan nasional dengan peran Indonesia dalam peningkatan ekonomi digital yaitu sebagai nilai strategis bagi Indonesia untuk pemulihan ekonomi dan untuk mencapai Indonesia yang maju apabila Indonesia mampu memanfaatkan peluang dan tantangan untuk bisa memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, Presidensi yang akan berlangsung di Bali ini akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan berbagai kemajuan yang telah

dicapai Indonesia kepada dunia internasional menjadi titik awal dalam pemulihan ekonomi.

Terutama yang dibahas dalam penelitian ini lebih kepada arah transformasi digital yang dimana pada masa pandemic ini telah menjadi salah satu sumber perekonomian yang baru. Untuk itu salah satu dari kepentingan Indonesia dalam Presidensi G20 ialah berfokus kepada peningkatan kemampuan pada sector ekonomi digital serta literasi digital yang mampu dimanfaatkan untuk memastikan transformasi digital yang inklusif yang kegunaannya dapat dirasakan di dalam maupun di luar negeri.

2.2 Tinjauan Literatur

Sebagai pemegang Presidensi tahun 2022, Indonesia memiliki peran menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Untuk itu, perhelatan ini dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai wadah serta ajang menunjukkan posisi negara kita dalam memimpin forum global yang bertujuan mengatasi berbagai tantangan serta isu di tingkat dunia. Salah satunya adalah merencanakan strategi kerjasama ekonomi untuk meningkatkan perekonomian. Selain itu kebijakan yang dilakukan Indonesia terhadap ekonomi digital juga perlu untuk dibahas dimana dalam kebijakan yang dilakukan Indonesia terdapat upaya-upaya untuk memenuhi target yang telah ditentukan sebagai cara untuk mencapai kepentingan nasional. Globalisasi yang mempengaruhi peran juga kebijakan Indonesia dalam ekonomi digital mampu memudahkan dalam mencapai pasar internasional yang mana hal ini dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi pulih kembali.

Indonesia yang memiliki langkah strategi guna memenuhi kepentingan nasionalnya yaitu untuk memulihkan perekonomian negara mengambil langkah untuk memaksimalkan dan meningkatkan ekonomi berbasis digital. Dalam forum G20 Indonesia memiliki peran aktif dalam kontribusinya terhadap perekonomian global. Di dalam era globalisasi interdependensi antarnegara akan semakin tinggi, sehingga transformasi ekonomi kearah ekonomi digital memang sangat diperlukan agar Indonesia dapat menghadapi hantaman globalisasi dan dapat mempertahankan pencapaian kepentingan nasionalnya. Dengan kontribusi Indonesia di forum G20, diharapkan Indonesia dapat berkontribusi lebih dan mampu memulihkan ekonomi nasional maupun global dengan cara peningkatan terhadap ekonomi digital.

Salah satu literatur yang penulis review adalah kajian yang ditulis oleh **Harra Fisabilillah dengan tulisannya yang berjudul Motif Indonesia Membahas *Inclusive Digital Economy Accelerator HUB (IDEA HUB)* Dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Osaka 2019.** Dalam jurnal tersebut penulis membahas mengenai analisisnya terhadap motif Indonesia yang mengusulkan konsep IDEA HUB pada pertemuan KTT G20 di Osaka. Pada penelitian tersebut memberikan hasil bahwa Indonesia menunjukkan respon yang positif dalam perkembangan ekonomi digital. Melalui IDEA HUB, Indonesia telah sepenuhnya memenuhi komitmennya untuk meningkatkan interoperabilitas berbagai nasional dan internasional kerangka kerja.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Harra Fisabilillah dengan penelitian ini adalah latar belakang waktu yang diambil. Dalam penulisan ini, penulis tidak

hanya membahas kebijakan Indonesia pada forum G20 2019 saja akan tetapi penulis juga membahas mengenai kebijakan Indonesia pada forum G20 2022. Selain itu teori yang diambil oleh penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Harra Fisabillilah.

Selain perbedaan yang ada, persamaan yang dari penelitian ini adalah karena penulis juga akan membahas kebijakan Indonesia pada forum G20 pada tahun 2019 di Osaka dengan mengusung tema IDEA Hub.

Selanjutnya kajian yang ditulis oleh **Wiwiek Rukmi Dwi Astuti (2020)** dalam penelitiannya yang berjudul **“Diplomasi Ekonomi Indonesia di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo”**.

Di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis selalu mengambil posisi strategis untuk mewujudkan kepentingan ekonominya. Ekonomi menjadi domain penting dalam orientasi politik luar negeri Indonesia, sehingga ekonomi adalah upaya Indonesia terlibat dalam menstabilkan ekonomi nasional, regional dan internasional. Pola pemikiran ini sebagai bentuk rasionalitas negara modern yang mengkalkulasi setiap kontribusi melalui aksi. Perubahan ekonomi politik global tentu saja menuntut peran aktif dan adaptif dalam menjalin hubungan ekonomi dalam kerja sama internasional. Diplomasi ekonomi menjadi salah satu instrumen penting bagi Indonesia dalam mewujudkan kemakmuran Indonesia, sehingga kemampuan dalam berdiplomasi ekonomi merupakan hal yang krusial.

Menurut Astuti, hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan Indonesia di G20 sebagai upaya berkontribusi dalam ekonomi global. Orientasi ekonomi yang

tinggi membuat diplomasi ekonomi adalah pilihan rasional bagi Indonesia untuk menjaga kepentingannya di luar negeri. Diplomasi ekonomi Indonesia digunakan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional dan internasional baik bidang perdagangan, investasi dan finansial. Dengan kolaborasi tiga bidang tersebut diharapkan bisa menjadi indikator menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan global serta sebagai upaya mencari mitra dan menjaga mitra Indonesia di luar negeri. Dengan demikian, upaya tersebut sebagai bentuk implementasi politik luar negeri Indonesia pada bidang ekonomi.¹⁰

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Wiwiek Rukmi Dwi Astuti dengan penelitian ini terletak pada focus penelitian. Dalam penelitian terdahulu, lebih fokus kepada orientasi politik luar negeri Indonesia (Diplomasi Ekonomi) dalam menstabilkan perekonomian Indonesia sebagai keterlibatan Indonesia dalam forum G20, sedangkan penelitian yang sekarang lebih berfokus kepada Peran Indonesia dalam pengembangan dan peningkatan Ekonomi dalam berbasis digital.

Selain dari perbedaan yang ada, persamaan dari penelitian ini adalah sama - Sama membahas peran Indonesia dalam kerjasama di forum G20 dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif.

10 Astuti, W. R. D dan Fathun, L. M. *Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo*, (Intermestic: Journal of International Studies 5 (1): 47-88, 2020), diakses dari doi:10.24198/intermestic.v5n1.4

Selanjutnya penelitian, **Cindy Larasati dan Ester Desy Natasya (2017)** dalam penelitiannya yang berjudul **“Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan”**.

Menurut Cindy dan Ester, dalam forum G-20 negara Indonesia berperan aktif serta ikut berkontribusi sebagai anggota tunggal yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, di dalam forum ini Indonesia banyak menghadapi tantangan seperti bagaimana Indonesia harus dapat menjaga kestabilan negara khususnya dalam kebijakan ekonomi. Selain itu, Indonesia harus jeli dalam melihat dan belajar bagaimana kerja sama yang dijalin dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara maju, dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak saling merugikan. Selain itu, Indonesia harus mampu mempersiapkan diri dan mampu bersaing dalam dunia perekonomian agar tidak tertinggal dengan negara anggota lainnya dan sebagai satu-satunya negara yang mewakili ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar. Indonesia tak hanya harus membawa kepentingan domestik dalam negeri, namun juga membawa kepentingan ASEAN ke dalam forum ini.¹¹

Dari penelitian tersebut perbedaan yang penelitian dibahas oleh Cindy Larasati dengan penelitian penulis yaitu mengenai pemanfaatan forum G20 sebagai Peluang Indonesia untuk meningkatkan pengaruh Indonesia dalam kancah Internasional, selain itu penelitian ini juga pemanfaatan investasi infrastruktur untuk mengatasi hambatan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian berfokus kepada target yang diterapkan Indonesia dalam Forum G20 dalam kebijakan ekonomi

¹¹ Larasati, C. dan Natasya, E. D. *Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan*, (Jurnal Hubungan Internasional 2: 147-159, 2017)

digital yang berdampak bagi perekonomian digital serta pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid – 19. Sedangkan persamaannya terletak pada, pengelolaan transformasi digital sebagai peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan dan mempermudah pendapatan.

